



Pansus SOTK Anambas Studi Banding ke Cimahi dan Konsultasi ke Kemendagri

Senin, 14 November 2016 | 13.30 WIB | BATAMTODAY.COM Gallery Foto



Tim Pansus SOTK Anambas foto bersama usai studi banding ke DPRD Cimahi.

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Panitia Khusus (Pansus) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan studi banding ke Cimahi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, terkait penyusunan SKPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ketua Pansus SOTK Kabupaten Anambas, Muhammad Dai, mengaku tertarik meniru SKPD Cimahi, yang berpenduduk 700 ribu jiwa yang tersebar di tiga kecamatan, hanya berjumlah 14 SKPD. Pihaknya pun menargetkan membentuk 18 SKPD. Perampingan ini dengan menggabungkan perangkat daerah yang bebannya ringan dengan yang sedang.

"Menurut hemat Pansus, pasti bisa terealisasi. Cimahi dengan penduduk 700 ribu jiwa bisa membentuk 14 SKPD, dan terbukti fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Sedangkan penduduk kita hanya 46 ribu jiwa, pasti bisa hanya dengan 18 SKPD," ungkap Muhammad Dai, Senin (10/10/2016).

"Untuk apa kita pertahankan perangkat daerah yang beban kerjanya ringan, itu otomatis membuang-buang anggaran saja. Kalau dirampingkan, tentu akan menghemat anggaran," tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Imran, mengatakan, pembahasan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Kepulauan Anambas hingga saat ini sudah masuk tahap finalisasi. Ranperda ini ditargetkan disahkan mendadi Perda pada 21 November 2016 mendatang.

"Ranperda SOTK sudah rampung. Usai studi banding, dilakukan pembahasan dengan SKPD yang masih ada saat ini, serta tahap terakhir telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Dari hasil perampingan, Muhammad Dai menambahkan, SKPD Kabupaten Anambas terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 11 Dinas, 3 Badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, dan 7 Kecamatan, serta badan perbatasan. Mengingat badan perbatasan langsung dari pusat, jadi total keseluruhan 26 SKPD.

"Melalui perampingan ini, kita harapkan daerah semakin hemat menggunakan anggaran. Pemerintah daerah pun prinsipnya setuju perampingan ini. Kalau pengurangan Pegawai Tidak Tetap (PTT), itu tergantung pemerintah daerah. Dan perlu diketahui, penyusunan APBD 2017 mendatang harus sesuai dengan PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan sesuai dengan Perda SOTK," paparnya.



Kabag Hukum Zulkarnaen berdiskusi dengan Asisten I Pemkab Anambas, Nurmas, di saat studi banding SOTK ke



Ketua Pansus SOTK Anambas, Muhammad Dai, menerima hasil studi banding dari Pimpinan DPRD Cimahi.



Ketua Pansus SOTK, Muhammad Dai, saat memberikan penjelasan kepada peserta rapat di ruang rapat DPRD Cimahi.



Ketua Pansus SOTK, Muhammad Dai (mengenakan jas) memberikan penjelasan tentang perampingan SOTK di ruang rapat DPRD Cimahi.



Pejabat Kementerian Dalam Negeri saat memberikan penjelasan tentang SOTK kepada Tim Pansus SOTK Anambas.



Pimpinan DPRD Cimahi saat memberi kata sambutan atas kunjungan Tim Pansus SOTK Pemkab Anambas.



Pimpinan DPRD Cimahi saat memberi penjelasan tentang kondisi dan situasi Kota Cimahi kepada Pansus SOTK Anambas.



Tim Pansus serius mendengarkan pemaparan Pimpinan DPRD Cimahi yang memiliki 14 SKPD.



Tim Pansus SOTK Anambas foto bersama usai konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.



Tim Pansus SOTK Anambas saat mendengarkan pemaparan dari Pimpinan DPRD Cimahi.



Tim Pansus SOTK Anambas, Julius (memegang mikrofon) saat memberikan penjelasan kepada Pimpinan DPRD Cimahi.



Tim Pansus SOTK dan Pejabat Kementerian Dalam Negeri bertukar pikiran saat konsultasi SOTK.



Anggota Pansus SOTK DPRD Lingga, Julius, saat bertanya tentang SOTK dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Abadikan Momen Spesial Anda di **BATAMTODAY.COM Galley Foto**

Untuk Pemesanan Hubungi :

Komplek Oriana Blok A. 02 No. 08, Batam Centre - Batam

Tlp : (0778) 7482-514, (0778) 5120-718

Email : redaksi@batamtoday.com